



► PENGHEMATAN ANGGARAN

JAKARTA — Pemerintah menjamin efisiensi belanja tidak akan mengganggu perkembangan perekonomian pada semester II/2017. Kebijakan tersebut diklaim hanya mengalihkan alokasi belanja ke hal yang lebih produktif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, efek pengalihan belanja justru akan memacu ekonomi pada semester II dan membuat situasi lebih baik karena dialokasikan ke belanja—belanja produktif.

"Kalau ini benar, maka yang mau menghemat jatahnya ke perusahaan angkutan, pembelian atau perusahaan lain. Sekarang dialihkan ke yang lebih produktif, jadi malah bisa lebih baik," kata Darmin di Gedung DPR Jakarta, Kamis (6/7).

Darmin menambahkan, pemerintah akan tetap hemat belanja barang untuk tahun anggaran

Adapun, beleid itu diitken oleh Presiden Joko Widodo pada 22 Juni 2017, yakni Inpres No. 4/2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.

Melalui Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan seluruh jajaran eksekutif untuk mengambil langkah-langkah efisiensi belanja barang Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017 sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi terkini memang memaksa pemerintah untuk memangkas belanja demi menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3% mengingat ada risiko penerimaan meleset dari target (*shortfall*) sebesar Rp50 triliun dari target APBN.

Awalnya, pemerintah mengasumsikan pelebaran defisit dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2017 sebanyak 2,92%. Namun seiring berlangsungnya penghematan secara alamiah defisit menjadi 2,67%.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah penerimaan perpajakan yang sudah masuk ke kas negara senilai Rp571,9 triliun atau baru 38, % dari target APBN 2017 senilai Rp1.498,9 triliun.

Realisasi penerimaan itu pula yang membuat pemerintah akhirnya memangkas pertumbuhan penerimaan perpajakan dalam RAPBN-P dari 16% menjadi 12,9%.

Situasi berbeda justru terjadi pada belanja pemerintah. Selama semester 1/2017, belanja pemerintah justru mengalami pertumbuhan yang paling tinggi dalam kurun waktu satu terakhir ini. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp498,6 triliun atau 37,9% dari target APBN 2017. Jumlah itu terdiri dari belanja kementerian dan lembaga senilai Rp263,9 triliun, non K/L senilai Rp234,6 triliun, serta subsidi senilai Rp58,7 triliun.

Melihat situasi itu, pemerintah dalam Rancangan APBN-P 2017 tengah mengusulkan supaya belanja pemerintah naik sebanyak Rp36,1 triliun atau menjadi Rp1.351,6 triliun.

Gini ratio (Inde 0,4

Sumber: Inpres 4/2017